

Pemerintah Aceh Gelar Forum Konsultasi Publik RKPA 2026, Fokus Hilirisasi dan Industrialisasi SDA

Category: Aceh, News

written by Maulya | 25/03/2025



ORINEWS.id – Pemerintah Aceh menggelar Forum Konsultasi Publik terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Aceh (RKPA) Tahun 2026 pada Selasa (25/3/2025). Acara yang dihadiri berbagai pemangku kepentingan ini bertujuan untuk menyusun kebijakan pembangunan yang lebih partisipatif, inklusif, dan akuntabel.

Plt. Sekretaris Daerah Aceh, M. Nasir dalam sambutannya menegaskan bahwa RKPA 2026 akan berorientasi pada peningkatan produktivitas sektor unggulan melalui hilirisasi dan

industrialisasi sumber daya alam (SDA) guna mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif.

“Forum ini menjadi wadah strategis untuk menyepakati permasalahan awal pembangunan, menentukan prioritas daerah, serta menyelaraskan program pembangunan dengan target provinsi,” ujar Nasir.

Pemerintah Aceh mencatat capaian positif dalam penurunan angka kemiskinan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) [Aceh](#), tingkat kemiskinan pada September 2024 turun menjadi 12,64 persen, mengalami penurunan sebesar 1,59 persen poin dibandingkan Maret 2024 yang berada di angka 14,23 persen.

“Meski menunjukkan tren positif, kita tidak boleh berpuas diri. Diperlukan inovasi serta strategi intervensi yang lebih efektif untuk terus menekan angka kemiskinan,” tambahnya.

Pemerintah Aceh berkomitmen untuk meningkatkan perlindungan sosial, mendorong peningkatan pendapatan keluarga, serta memperluas akses pendidikan guna memutus rantai kemiskinan. Nasir juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah, akademisi, dunia usaha, serta masyarakat dalam memastikan kebijakan pembangunan yang lebih efektif dan tepat sasaran.

“Dengan semangat kebersamaan, kita harus bekerja sama, menyatukan visi, serta membangun sinergi agar RKPA 2026 benar-benar menjadi instrumen yang mampu mendorong pembangunan Aceh yang lebih maju, berkelanjutan, dan berdampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat,” tutupnya.

Acara ini turut dihadiri oleh perwakilan dari Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PPN/Bappenas, Bank Indonesia, DPR Aceh, Forkopimda Aceh, akademisi, hingga para Kepala Satuan Kerja Perangkat Aceh. Forum ini diharapkan menghasilkan masukan konstruktif yang akan memperkaya perencanaan pembangunan Aceh tahun 2026. []